

## Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Pertanian dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Enrekang

Nursafitra M<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas PEPABRI Makassar

E-mail (*correspondences*) : [vitanursafitra@gmail.com](mailto:vitanursafitra@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### *Article history:*

Submitted:

3 September 2025

Review:

16 September 2025

Accepted:

5 Oktober 2025

Available online:

10 Oktober 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang dengan fokus pada sektor pertanian dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat yang memiliki relevansi kuat dengan *Resilience Theory in Rural Development* karena mampu menggambarkan kondisi faktual dan arah pembangunan yang diperlukan di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Kabupaten Enrekang dikenal sebagai sentra produksi hortikultura, namun masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga dan ketergantungan pada tengkulak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*literatur review*), observasi, dan telaah dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan sektor pertanian berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, serta pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan petani. Meskipun telah ada upaya perbaikan dan implementasi kebijakan, khususnya dalam hal stabilisasi harga dan penguatan pasar. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang dengan fokus pada sektor pertanian dan ketahanan sosial-ekonomi di Kabupaten Enrekang terlaksana dengan baik, meskipun demikian, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Enrekang sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan lokal. Rekomendasi penelitian menyarankan perlunya penguatan lembaga pemasaran daerah, peningkatan investasi infrastruktur, serta pelatihan intensif bagi petani agar mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi pertanian berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah; Pertanian; Ekonomi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the regional development policy strategy in Enrekang Regency with a focus on the agricultural sector and the socio-economic resilience of the community, which has strong relevance to the Resilience Theory in Rural Development because it is able to describe the factual conditions and the direction of development needed in rural areas that depend on the agricultural sector. Enrekang Regency is known as a center for horticultural production, but still*

*faces challenges in the form of price fluctuations and dependence on middlemen. The research methods used are literature review, observation, and review of regional policy documents. The results of the study indicate that the development policy strategy is directed at strengthening the agricultural sector based on local potential, improving infrastructure and accessibility, and empowering communities through farmer institutions. Although there have been efforts to improve and implement policies, especially in terms of price stabilization and market strengthening. The conclusion of this study confirms that the regional development policy strategy in Enrekang Regency with a focus on the agricultural sector and socio-economic resilience in Enrekang Regency has been implemented well, however, the success of development in Enrekang Regency is greatly influenced by the synergy between the government, the community, and local institutions. Research recommendations suggest the need to strengthen regional marketing institutions, increase infrastructure investment, and provide intensive training for farmers to enable them to adapt to market dynamics and sustainable agricultural technologies.*

**Keywords:** *Strategy of Region Development Policy; Agriculture; Economy*

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sebutan Bumi Massenrempulu. Daerah ini memiliki karakteristik geografis pegunungan dan iklim sejuk yang sangat mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya hortikultura seperti sayuran dan kopi (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020). Wilayah ini memiliki karakteristik geografis pegunungan dengan iklim sejuk yang sangat mendukung aktivitas pertanian, khususnya sektor hortikultura dan perkebunan kopi (Hasanuddin, 2023). Potensi tersebut menjadikan Enrekang sebagai salah satu sentra produksi pertanian penting di Sulawesi Selatan (Wafiq et al., 2022). Namun, meskipun memiliki keunggulan komparatif di bidang pertanian, masyarakat Enrekang masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pembangunan daerah, seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya akses pasar (Saleh et al., 2018). Kondisi ini menuntut adanya strategi kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis potensi lokal (Sen, 1999). Kabupaten Enrekang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan daerah, di antaranya keterbatasan infrastruktur, ketidakstabilan harga komoditas, rendahnya akses pasar, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi pertanian modern (Akmal, 2024).

Pembangunan daerah pada era desentralisasi pasca tahun 2000 memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Simanjuntak, 2015). Kabupaten Enrekang sebagai daerah agraris dituntut untuk mampu mengelola potensi pertaniannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah (Febriansyah et al., 2018). Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan di daerah ini tidak hanya berfokus pada

pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan (Kahar, 2018).

Dalam konteks pembangunan berbasis potensi lokal, pertanian menjadi sektor unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Diversifikasi komoditas seperti kubis, wortel, tomat, dan kopi arabika merupakan salah satu strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga petani (Syahrial et al., 2024). Namun, penguatan sektor pertanian di Enrekang memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, terutama dalam hal penyediaan sarana produksi, stabilisasi harga, serta peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Tanpa strategi kebijakan yang tepat, potensi pertanian hanya akan menjadi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal (Putri et al., 2024).

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah (Miftahul Azis & Esty Asriyana Suryana, 2023). Infrastruktur seperti jalan tani, irigasi pertanian, pasar tradisional, serta penerapan teknologi pertanian modern sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian (Julvin Saputri Mendrofa et al., 2024). Sayangnya, hingga kini pembangunan infrastruktur di Enrekang masih belum merata dan lebih banyak terpusat di wilayah tertentu. Kesenjangan infrastruktur ini berdampak pada terbatasnya akses petani terhadap pasar dan memperkuat ketergantungan mereka pada tengkulak (Lasri, 2016). Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan harus menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam mendukung sektor pertanian dan memperkuat daya saing daerah (Sarika, 2024).

Selain faktor ekonomi dan infrastruktur, aspek sosial juga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan petani merupakan strategi kebijakan yang tidak dapat diabaikan (Anantanyu, 2011). Kelompok tani di Enrekang telah berperan sebagai wadah solidaritas, akses modal, dan sarana untuk memperjuangkan kepentingan petani (Sudarmanto, 2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pembangunan (Samad et al., 2019). Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpihak kepada petani kecil dan mampu memperkuat kelembagaan lokal secara berkelanjutan (Syarifuddin, 2017). Dengan demikian, strategi kebijakan pembangunan di Kabupaten Enrekang harus mengintegrasikan aspek pertanian, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menghasilkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Wahab, 2009).

Meskipun berbagai penelitian tentang pembangunan pertanian di Kabupaten Enrekang telah dilakukan, sebagian besar masih menitikberatkan pada aspek teknis produksi, potensi komoditas hortikultura, serta tantangan infrastruktur dan akses pasar. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan strategi kebijakan pembangunan daerah dengan dimensi ketahanan sosial-ekonomi masyarakat dalam perspektif *Resilience Theory in Rural Development* masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, kelembagaan petani, dan masyarakat lokal dapat membentuk strategi adaptif yang mampu menjawab fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Gap ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih holistik dan interdisipliner yang tidak hanya melihat pertanian sebagai sektor ekonomi semata, tetapi juga sebagai basis ketahanan sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Enrekang.

Berbagai tinjauan literatur yang ada mengenai strategi pembangunan daerah berbasis pertanian menunjukkan bahwa penguatan sektor ini menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sen (1999) menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada perluasan kapabilitas manusia, sehingga kebijakan pertanian tidak boleh sebatas meningkatkan produksi, tetapi juga harus memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Anantanyu (2011) menegaskan peran kelembagaan petani sebagai wadah kolektif yang mampu memperkuat akses modal, informasi, dan jaringan pasar. Penelitian Wahab (2009) menekankan bahwa strategi kebijakan pembangunan harus bersifat inklusif, memperhatikan aspek keadilan, dan mampu menjamin keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks infrastruktur, Lasri (2016) dan Sarika (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses jalan, irigasi, dan pasar menjadi hambatan utama bagi petani dalam memperkuat daya saing produk mereka. Di sisi lain, konsep *Resilience Theory in Rural Development* (Folke, 2006; Walker & Salt, 2012) ini memperluas perspektif pembangunan dengan menekankan pada kemampuan masyarakat pedesaan untuk bertahan (*persistence*), beradaptasi (*adaptability*), dan bertransformasi (*transformability*) menghadapi perubahan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Serta penelitian Putri et al. (2024) dan Syahrial et al. (2024) juga menyoroti pentingnya diversifikasi komoditas dan digitalisasi pemasaran dalam memperkuat ketahanan ekonomi petani.

*State of the art* dalam penelitian ini yaitu menganalisis pembangunan pertanian saat ini bergeser dari fokus teknis produksi semata menuju pendekatan yang lebih holistik dengan menekankan integrasi aspek sosial, kelembagaan, infrastruktur, dan ketahanan masyarakat pedesaan. Penelitian terkini menunjukkan pergeseran pendekatan kajian pembangunan pertanian dari fokus semata-mata pada produksi dan teknis agronomi menuju analisis yang lebih holistik mengintegrasikan dimensi sosial, kelembagaan, dan ketahanan (*resilience*) sistem pedesaan. Sedangkan dalam konsep *resilience* menekankan kemampuan sistem sosial-ekologis untuk bertahan (*persistence*), beradaptasi (*adaptability*), dan bertransformasi (*transformability*) menghadapi tekanan ekonomi, iklim, dan pasar, sehingga menjadi kerangka yang relevan untuk mengevaluasi strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Pada konteks Kabupaten Enrekang, data statistik dan studi lokal menegaskan peran sentra hortikultura dalam struktur ekonomi daerah sekaligus mencatat dinamika produksi dan kebutuhan infrastruktur serta akses pasar yang belum merata, yang mempengaruhi kapasitas adaptif petani. Selain itu, studi terapan di Enrekang menunjukkan potensi pengembangan agrowisata dan integrasi teknologi hortikultura namun juga mengindikasikan perlunya penguatan peran penyuluh dan kelembagaan lokal agar transfer teknologi dan akses pasar dapat terealisasi secara inklusif. Dengan demikian, *state of the art* dalam penelitian ini menegaskan perlunya penelitian yang menggabungkan analisis kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, modal sosial, dan indikator ketahanan ekonomi pada skala lokal suatu pendekatan interdisipliner yang masih relatif terbatas di studi sebelumnya dan menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengisi gap empiris di Kabupaten Enrekang.

Dalam konteks tersebut, perumusan strategi kebijakan pembangunan yang tepat menjadi sangat penting. Strategi kebijakan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek ketahanan sosial masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini berupaya menganalisis strategi kebijakan pembangunan di Kabupaten Enrekang dengan menekankan peran pemerintah daerah, masyarakat, serta aktor non-pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, masyarakat petani, serta kelembagaan lokal di Kabupaten Enrekang menjadi subjek dalam penelitian ini baik yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan daerah berbasis sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Enrekang merupakan aktor utama dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi kebijakan pembangunan, sementara itu para petani di Kabupaten Enrekang merupakan kelompok yang secara langsung terdampak oleh fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar, dan ketersediaan sarana produksi. Dilain sisi, kelembagaan petani seperti kelompok tani, koperasi, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai wadah partisipasi, distribusi modal, akses informasi, serta penguatan solidaritas sosial. Kelembagaan ini memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan petani dengan pemerintah maupun pasar. Selain pemerintah dan masyarakat, penelitian ini juga menyoroti peran tengkulak, penyuluh pertanian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta yang terlibat dalam rantai nilai pertanian di Enrekang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Enrekang. Data primer diperoleh melalui studi literatur (*literature review* atau *library research*), wawancara dan observasi dengan menganalisis, membandingkan, dan mensintesis hasil penelitian yang sudah ada. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung aktivitas pertanian, infrastruktur pendukung, dan pola interaksi sosial masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kabupaten Enrekang, Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, serta publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu memiliki informasi yang relevan dan mendalam mengenai kebijakan pembangunan daerah, terutama yang berhubungan dengan sektor pertanian dan sosial ekonomi. Adapun informannya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, Anggota kelompok Tani Kabupaten Enrekang, Pelaku UMKM Kabupaten Enrekang, dan Masyarakat/Petani Kabupaten Enrekang.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (pemerintah, masyarakat, dokumen) dan triangulasi metode (wawancara, observasi, studi dokumen) (Susanto et al., 2023).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Pertanian dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Enrekang**

Kabupaten Enrekang merupakan daerah agraris yang sangat bergantung pada sektor pertanian dengan komoditas utama seperti bawang merah, padi, jagung, kubis, wortel, tomat, cabai dan kopi. Namun, sektor ini menghadapi sejumlah permasalahan mendasar antara lain fluktuasi harga pasar, ketergantungan pada tengkulak, perlu peningkatan infrastruktur pertanian, perlu memaksimalkan akses teknologi, serta lemahnya kelembagaan petani dan modal sosial di tingkat lokal. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya tekanan baik dari sisi ekonomi (harga dan pasar), lingkungan (perubahan iklim, degradasi lahan), maupun sosial kelembagaan (akses dan partisipasi). Dalam konteks ini, *Resilience Theory in Rural*

*Development* (Folke, 2006; Walker & Salt, 2012) digunakan karena *konsep Resilience Theory in Rural Development* lebih ini menekankan bagaimana masyarakat pedesaan mampu bertahan (*persistence*) menghadapi tekanan eksternal, beradaptasi (*adaptability*) dengan diversifikasi pertanian dan pemanfaatan teknologi baru, serta bertransformasi (*transformability*) melalui pemberdayaan kelembagaan, penguatan modal sosial, dan pemerataan akses sumber daya. Dengan kata lain, teori ini tidak hanya melihat pembangunan dari aspek ekonomi dan fisik semata, tetapi juga memasukkan dimensi sosial, kelembagaan, dan budaya yang sangat penting dalam konteks pembangunan daerah berbasis pertanian seperti di Enrekang. Selain itu, indikator-indikator dalam teori ini (diversifikasi ekonomi, kapasitas adaptif melalui infrastruktur dan teknologi, serta ketahanan sosial melalui modal sosial, kelembagaan, dan pemerataan akses) langsung berkaitan dengan isu-isu yang diangkat dalam pendahuluan penelitian, yaitu ketergantungan ekonomi pada komoditas tunggal, lemahnya aksesibilitas infrastruktur, serta rendahnya partisipasi kelembagaan petani. Oleh karena itu, penerapan konsep *Resilience Theory* memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk merumuskan strategi kebijakan pembangunan daerah yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga pada penguatan struktur sosial-ekonomi masyarakat.

#### 1. Ekonomi & Produksi Pertanian (Economic Resilience)

Sektor pertanian di Kabupaten Enrekang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Diversifikasi komoditas pertanian menjadi salah satu strategi utama yang telah dilakukan petani. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi padi, jagung, bawang merah, kubis, dan kopi, di mana masing-masing memiliki pasar berbeda baik di tingkat lokal maupun regional. Data memperlihatkan bahwa produksi padi pada tahun 2023 mencapai angka 31.943,00 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sementara itu produksi bawang merah mengalami peningkatan menjadi 1.759.000,00 pada tahun 2023.

Tabel 1. Luas Panen Dan Produksi Hasil Pertanian

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	Padi		
	Luas Panen (Ha)	8.381,00	6.914,00
	Produksi (Ton)	40.316,70	31.943,00
2.	Jagung		
	Luas Panen (Ha)	24.138,00	11.819,20
	Produksi (Ton)	157.543,00	60.357,60
3.	Bawang Merah		
	Luas Panen (Ha)	9.877,00	13.669,00
	Produksi (Kuintal)	329.405,00	1.759.330,00
4.	Kubis		
	Luas Panen (Ha)	2.356,00	3.355,00
	Produksi (Kuintal)	315.684,00	344.145,00
5.	Kopi		
	Luas Panen (Ha)	19.861,00	19.871,00
	Produksi (Ton)	8.451,00	8.714,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang Tahun 2023

Dari sisi akses pasar, petani di wilayah Kecamatan Anggeraja, Baraka, dan Alla relatif lebih mudah menjual hasil produksi ke pasar tardisional yang ada di Kabupaten Enrekang serta ke

pasar regional di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, sedangkan untuk produksi kopi akses pasar ekspor dilakukan melalui koperasi petani yang bekerja sama dengan eksportir. Namun, masih terdapat petani hortikultura yang sangat bergantung pada tengkulak karena minimnya kelembagaan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi sudah berjalan dengan baik, penguatan akses pasar dan stabilitas harga penting dalam meningkatkan *economic resilience* masyarakat petani di Kabupaten Enrekang.

Menurut Folke (2006), *economic resilience* dalam pembangunan pedesaan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, tetapi pada kemampuan sistem ekonomi lokal untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar dan lingkungan melalui diversifikasi dan inovasi. Kondisi di Enrekang menunjukkan bahwa petani mulai menyesuaikan diri dengan dinamika pasar—berpindah dari ketergantungan pada padi ke hortikultura bernilai jual tinggi seperti bawang merah dan sayuran dataran tinggi.

## 2. Infrastruktur & Teknologi (Adaptive Capacity)

Pembangunan infrastruktur pertanian di Kabupaten Enrekang mulai diarahkan untuk memperkuat kapasitas adaptif petani dalam menghadapi tantangan distribusi, iklim, dan pasar. Berdasarkan Rencana Program & Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang menempatkan urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan yang menjadi prioritas dengan salah satunya adalah aspek Pengembangan Jaringan Jalan Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi sasaran Daerah yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Enrekang sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat menjual hasil panen ke pasar-pasar yang ada di wilayah kabupaten Enrekang. Pemanfaatan teknologi pertanian modern sudah mulai diperkenalkan, adopsi teknologi pertanian pada petani hortikultura yang aktif menggunakan teknologi pertanian modern (traktor mini, inovasi light trap, dll) sudah banyak digunakan dan dimanfaatkan petani untuk memudahkan pekerjaannya.

Gambar 1. Teknologi Inovasi Light Trap pengendalian Hama di Kabupaten Enrekang



Sumber: Website Resmi Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

Menurut Walker & Salt (2012), *adaptive capacity* merupakan kemampuan sistem sosial-ekologis untuk belajar dan berinovasi dalam menghadapi perubahan eksternal. Penerapan teknologi pertanian modern di Enrekang menunjukkan bahwa petani mulai memasuki fase *adaptive learning*, di mana pengetahuan baru diintegrasikan dalam praktik budidaya. Namun, belum semua wilayah memiliki akses yang merata terhadap teknologi dan pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan akses teknologi dan pelatihan pertanian digital.

Inovasi diperlukan yang mengintegrasikan teknologi dalam pertanian melalui konsep (*smart farming*). Pelatihan bagi petani tentang teknik pertanian yang telah berbasis teknologi, misalnya penggunaan sensor dalam pemantauan cuaca, sistem irigasi otomatis, serta pemanfaatan IoT pada pertanian digital dan pada akses pasar dengan sistem real-time. Selain itu, akses terhadap fasilitas pendukung juga menjadi tantangan. Koperasi petani yang ada di Desa-Desa dimaksimalkan sehingga petani tidak bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan teknologi sudah berkembang dan memadai, kapasitas adaptif petani perlu dimaksimalkan secara merata pada sistem kelembagaan Desa dan Koperasi Desa secara lebih aktif.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat (Social Empowerment)

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Chambers (1997), pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses *enabling*, *empowering*, dan *participating*—artinya masyarakat diberi ruang untuk berperan sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Di Enrekang, peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan menjadi indikator bahwa kapasitas sosial dan kesetaraan gender dalam pembangunan desa mulai terbentuk. Aspek pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Enrekang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berbasis pertanian. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa relatif baik, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Salah satu contohnya adalah Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melaksanakan Pengembangan Hortikultura pada Lahan Kering atau *Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP)* pada tahun 2024 sampai 2028, sebagai bentuk pemantapan pelaksanaan program maka, Direktorat Jenderal Hortikultura menurunkan tim ahli ke Kabupaten Enrekang, yang menjadi salah satu dari 13 kabupaten penerima program dan bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang yang menjadi sasaran yaitu Kecamatan Angeraja pada komoditas bawang merah dengan luas 130 hektare dan Kecamatan Baroko pada komoditas kentang 60 sebesar hektare. Selain itu, Keterlibatan perempuan dan pemuda dalam kelompok tani menunjukkan tren meningkat. Kelompok tani yang ada kini lebih melibatkan peran aktif perempuan dan pemuda. Adanya pergeseran pola tradisional di mana pertanian hanya didominasi laki-laki dewasa akibat citra pertanian yang dianggap kurang modern, dan kini telah beralih melibatkan partisipasi pemuda sehingga menunjukkan tren yang positif yang didukung oleh Pemerintah melalui adanya Program Petani Milenial dengan fokus pada regenerasi profesi petani, pemanfaatan teknologi pertanian modern, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan dan sosialisasi didalam maupun di luar daerah Kabupaten Enrekang dilaksanakan dengan melibatkan kelompok tani dan Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang misalnya Bimbingan teknis yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang yaitu Bimtek untuk kawasan cabai dengan kemitraan *champion Cabai* dan Petugas Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Enrekang. Selain itu Pada bulan Oktober 2024 mengikutkan bimbingan teknis pada peningkatan kapasitas petani dalam mendukung produksi jagung, padi, dan tanaman hortikultura lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone yang melibatkan Kelompok Tani di Kabupaten Enrekang dan Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang

Dari sisi akses terhadap pelatihan dan penyuluhan pertanian, Dinas Pertanian Enrekang aktif melaksanakan pelatihan dan penyuluhan, dengan fokus pada teknik budidaya hortikultura, pengendalian hama, dan pemasaran digital, upaya penyuluhan pertanian dilaksanakan secara menyeluruh di sebagian besar berasal dari kecamatan sentra produksi seperti Anggeraja, Alla, dan Baraka. Namun demikian, peran masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan daerah masih perlu di optimalkan. Melalui forum desa dan kelompok tani sebagai wadah aspirasi, petani merasa terlibat langsung dalam mengawasi program bantuan, subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, sehingga lebih bisa melaksanakan fungsi kontrol sosial. Secara umum, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Enrekang sudah menunjukkan kemajuan dengan adanya partisipasi aktif dalam perencanaan dan peningkatan peran perempuan dan pemuda.

#### 4. Kelembagaan Petani (Institutional Resilience)

Teori North (1990), kelembagaan merupakan “aturan main” yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks pertanian, kelembagaan yang kuat menciptakan efisiensi koordinasi dan keadilan distribusi manfaat pembangunan. Konsep ini beresonansi dengan teori resilience, di mana keberlanjutan lembaga lokal menjadi *buffer system* terhadap guncangan ekonomi dan sosial.

Kelembagaan petani di Kabupaten Enrekang memainkan peran strategis dalam memperkuat ketahanan sektor pertanian dan sosial ekonomi masyarakat. Dari data Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Anggeraja (2019) tercatat sebanyak 15 gabungan kelompok tani (gapoktan). Namun, tingkat keberlanjutan kelembagaan ini bervariasi sementara itu beberapa kelompok tani yang memiliki administrasi dan kegiatan rutin secara konsisten, sedangkan sisanya masih bersifat pasif atau bergantung pada program pemerintah.

Tabel 2. Kelompok Tani dan Gapoktan desa/kelurahan di Kecamatan Anggeraja

No.	Desa/Kelurahan	Kelompok			
		Gapoktan	Tani Dewasa	Wanita Tani	Jumlah
1.	Tindalun	1	7	5	12
2.	Bambapuang	1	13	6	19
3.	Tanete	1	18	1	20
4.	Lakawan	1	13	3	16
5.	Siambo	1	5	-	5
6.	Singki	1	12	3	15
7.	Mataran	1	6	2	8
8.	Pekalobean	1	11	5	17
9.	Bubun Lamba	1	7	2	9
10.	Salu Dewata	1	5	2	7
11.	Mampu	1	6	3	9
12.	Batu Noni	1	11	-	11
13.	Saruran	1	8	1	9

14.	Tampo	1	10	2	12
15.	Mendatte	1	4	3	7
Jumlah		15	136	38	174

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Anggeraja (2019) (Laga, 2019)

Dalam hal akses terhadap bantuan pemerintah dan NGO, kelembagaan yang aktif memiliki peluang lebih besar. Kelompok Tani dan Gapoktan yang terbentuk berhasil mengakses program bantuan seperti subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, serta program P2L (Pekarangan Pangan Lestari). Tingkat keberhasilan kelompok tani biasa terkendala kapasitas administrasi dan jaringan eksternal. Perlu pemerataan akses sehingga sebagian petani kecil tidak sepenuhnya bergantung pada tengkulak dengan harga jual lebih rendah.

#### 5. Pemerataan Akses (Equity & Inclusion)

Teori *Development as Freedom*, pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial merupakan inti dari pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketimpangan akses mencerminkan lemahnya *equity governance* di tingkat lokal.

Pemerataan akses menjadi penting dalam pembangunan daerah berbasis pertanian di Kabupaten Enrekang. Meskipun demikian, petani kecil tidak mengalami kesulitan dan kendala dalam mengakses pupuk bersubsidi, bibit unggul, serta permodalan mikro. Selain itu kemudahan bantuan juga lebih mudah dijangkau oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani aktif atau gapoktan. Dari sisi pemerataan infrastruktur pertanian, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengupayakan infrastruktur yang memadai dengan pembangunan jalan tani, jaringan irigasi, dan akses pasar yang lebih baik. Sedangkan dalam hal akses pendidikan dan pelatihan pertanian, pemerintah daerah bersama penyuluh telah melakukan berbagai program pelatihan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemerataan pelatihan agar semua lapisan masyarakat tani mendapat manfaat. Pemerintah Kabupaten Enrekang telah berangsur memperbaiki dan memaksimalkan Aspek akses layanan dasar masyarakat di Kabupaten Enrekang misalnya cakupan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas/pustu) yang tersebar di setiap Kelurahan/Desa serta pada bidang pendidikan, angka partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) relatif tinggi. Dengan demikian, Program pembangunan daerah di Enrekang telah berjalan baik, kemudahan dalam hal akses input pertanian, infrastruktur, pelatihan, pendidikan, dan layanan dasar.

#### 6. Modal Sosial (Social Capital)

*Social capital* merupakan sumber daya kolektif yang memperkuat efektivitas masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks teori *resilience*, modal sosial berfungsi sebagai fondasi ketahanan sosial—membantu masyarakat pulih cepat dari krisis ekonomi, cuaca ekstrem, atau gangguan produksi. Modal sosial masyarakat tani di Kabupaten Enrekang masih menjadi kekuatan utama dalam mendukung strategi pembangunan berbasis pertanian dan sosial ekonomi. Tingkat kepercayaan antarpetani relatif tinggi, terlihat dari praktik saling meminjam alat pertanian, benih, maupun berbagi informasi pasar tanpa kontrak tertulis, namun berbasis kepercayaan. Dalam menghadapi krisis seperti gagal panen akibat hama atau cuaca ekstrem, masyarakat desa menunjukkan solidaritas sosial yang kuat, misalnya dengan gotong royong dalam memperbaiki lahan rusak atau saling memberikan pinjaman pangan sementara. Selain itu, jaringan kerja sama antar kelompok tani dengan pemerintah daerah mulai terbangun melalui program penyuluhan pertanian, sementara kerja sama dengan

sektor swasta, khususnya dalam pemasaran kopi dan komoditas bawang merah, dll, semakin berkembang. Intensitas kegiatan kolektif seperti gotong royong membangun jalan tani, musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan, serta partisipasi aktif dalam koperasi tani menunjukkan bahwa modal sosial menjadi pondasi penting dalam menjaga ketahanan sosial ekonomi pedesaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Strategi kebijakan pembangunan daerah berbasis pertanian dan sosial ekonomi di Kabupaten Enrekang memiliki relevansi kuat dengan *Resilience Theory in Rural Development* karena mampu menggambarkan kondisi faktual dan arah pembangunan yang diperlukan di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Penguatan sektor pertanian berbasis potensi lokal telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, namun masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga dan ketergantungan pada tengkulak. Peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian, meskipun telah mulai dilakukan melalui pembangunan jalan tani, irigasi, dan pengenalan teknologi mulai diperkenalkan sehingga kapasitas adaptif petani berangsur optimal. Dari sisi sosial, pemberdayaan masyarakat, partisipasi perempuan dan pemuda, serta penguatan kelembagaan petani menunjukkan perkembangan positif, serta adanya dukungan kebijakan yang lebih inklusif. Pemerataan akses terhadap input pertanian, layanan dasar, serta distribusi pembangunan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, modal sosial masyarakat seperti tingkat kepercayaan, solidaritas, gotong royong, dan kerja sama dengan pemerintah maupun swasta telah terbukti menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan sosial-ekonomi pedesaan. Dengan demikian, strategi kebijakan pembangunan di Enrekang terlaksana dengan baik tetapi tetap diarahkan untuk memperkuat diversifikasi pertanian, meningkatkan infrastruktur dan teknologi, memberdayakan masyarakat serta kelembagaannya, menjamin pemerataan akses, dan memperkokoh modal sosial sebagai fondasi utama guna mewujudkan pembangunan pertanian yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

### b. Saran

Dalam mengimplementasikan dan memperkuat Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Pertanian dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Enrekang, maka beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini yaitu Diversifikasi komoditas dan penguatan akses pasar melalui pengembangan koperasi tani dan digitalisasi pemasaran agar petani tidak bergantung pada tengkulak, perlu adanya peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian dengan memperluas jalan tani, sistem irigasi modern, serta pelatihan berbasis smart farming untuk meningkatkan kapasitas adaptif petani, Penguatan kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan, koperasi) agar lebih berdaya dalam mengakses bantuan, distribusi hasil, dan membangun jejaring dengan pemerintah maupun swasta, Pemerataan akses input dan layanan dasar melalui kebijakan afirmatif untuk petani kecil, daerah pegunungan, serta kelompok rentan (perempuan dan pemuda), serta Penguatan modal sosial dan partisipasi masyarakat dengan mendorong gotong royong, musyawarah desa yang inklusif, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan pembangunan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2024). *Model Mangjampang Lessuna Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Dikecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*.
- Anantanyu, S. (2011). *Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. 7(2), 102–109.
- Ariyanto, K. (2024). *Analisis kebijakan pertanian: tinjauan terhadap rencana strategis Kementerian Pertanian dan pendekatan pembangunan pertanian di daerah*. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 22(1), 33–50. (akses publikasi dan ringkasan di repository Kementan / e-publikasi pertanian).  
<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/akp/article/download/3660/3801>
- Ashkenazy, A., Calvão Chebach, T., Knickel, K., Peter, S., Horowitz, B., & Offenbach, R. (2018). *Operationalising resilience in farms and rural regions — Findings from fourteen case studies*. *Journal of Rural Studies*, 59, 211–221. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.07.008>
- Djufry, F., & kolega. (2022). *Climate-smart agriculture implementation on coffee smallholders: barriers, preferences and support models*. *Land*, 11(7), 1112. <https://doi.org/10.3390/land11071112>
- Ekonomi, I., Studi, D. A. N., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Makassar, U. M. (2018). *Potensi Pertumbuhan Perekonomian*. [https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/1829-Full\\_Text.Pdf](https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/1829-Full_Text.Pdf)
- Hasanuddin. (2023). *Studi Pengembangan Desa Wisata Bone-Bone Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (Ksk) Enrekang Skripsi*.
- Jelsma, I., et al. (2024). *Collective action, replanting and resilience: key lessons for smallholder organisations*. *Food Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102xxx>
- Julvin Saputri Mendrofa, Martirah Warni Zendrato, Nisiyari Halawa, Elias Elwin Zalukhu, & Natalia Kristiani Lase. (2024). *Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pertanian. Tumbuhan: Publikasi Ilmu Sosiologi Pertanian Dan Ilmu Kehutanan*, 1(3), 01–12. <https://doi.org/10.62951/Tumbuhan.V1i3.111>
- Kahar, S. S. (2018). *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*. *Eprints.Stialanmakassar.Ac.Id*. <http://Eprints.Stialanmakassar.Ac.Id/Id/Eprint/100/1/2>. Suardi Kahar.Pdf
- LAGA, Z. (2019). *Analisis Daya Dukung Lahan Pertanian Intensif Hortikultura Di Kabupaten Enrekang (Studi: Kecamatan Anggeraja) Analysis Of Carrying Capacity Horticulture Intensive Farming Land In Enrekang Regency (Study: Anggeraja District)*.
- Lasri. (2016). *Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Batu Ke'De Kecamatan Masallekabupaten Enrekang Tahun 2016*.
- Manevska-Tasevska, G., & kolega. (2021). *Adaptive governance and resilience capacity of farms: mechanisms to enhance farm-level resilience*. *Frontiers in Environmental Science*, 9, 668836. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.668836>
- Miftahul Azis, & Esty Asriyana Suryana. (2023). *Komparasi Dan Implementasi Kebijakan*. 10(3), 179–198.
- Nursafitra, M., Agustang, A., & Idhan, A. M. (2021). *Pengaruh Disiplin Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang*. *Pengaruh Disiplin Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang*, 1, 71–

78.

Putri, A., Hasnah, Fitriana, W., Hafizah, D., Sahim, A. N., Syahni, R., Khairati, R., Paloma, C., Azriani, Z., Yonariza, Melinda, N., Yulinda, Mahdi, Triana, L., Nofialdi, & Evaliza, D. (2024). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan : Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Politik*. In *Andalas University Press*.

Rusmawati, E., & kolega. (2023). *Food security in Indonesia: The role of social capital*. *Journal of Rural Studies / Food Security (Taylor & Francis)*. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2169732>

Saleh, M. M., Teknik, J., Wilayah, P., Kota, D. A. N., Sains, F., & Teknologi, D. A. N. (2018). *(Infrastruktur Agropolitan) Muhammad Multazam Saleh, Pdf (1)*.

Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379–395. <https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Moderat/Article/Viewfile/3014/2750>

Sarika, S. (2024). *Belajen Kabupaten Enrekang Disusun Dan Diajukan Oleh*.

Sen, A. (1999). *I| Pembangunan Ekonomi*. [Http://Eprints.Unm.Ac.Id/10706/1/BukuPembangunanEkonomiContohFix.Pdf](http://Eprints.Unm.Ac.Id/10706/1/BukuPembangunanEkonomiContohFix.Pdf)

Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/Jbp.07.2015.111-130>

Studi, P., Sejarah, P., Makassar, U. N., Ilmu, F., & Dan, S. (2022). *Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Tahun Ajaran 2022*. 210602500016.

Sudarmanto, M. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Bawang Merah Di Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*.

Suparyanto Dan Rosad (2015). (2020). Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang Sejarah. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.60>

Syahrial, S., Leovita, A., & Yuliana Putri, O. (2024). Potensi Wilayah Berbasis Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Perekonomian Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 20(2), 129–140. <https://doi.org/10.20956/Jsep.V20i2.31829>

Syarifuddin. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*. 1–136.

Wahab, A. (2009). *Dampak Peningkatan Kualitas Jalan Lingkar Barat Enrekang Terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tesis*. 1–166.